

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia. Kemiskinan ini menjadi masalah tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Berbagai kebijakan, strategi dan langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan telah dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung di tingkat lokal dan nasional (Ratih *et al.*, 2017). Kemiskinan tidak terbatas pada jumlah dan proporsi penduduk miskin. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Kebijakan kemiskinan perlu, tidak hanya mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan (Baharuddin, 2015).

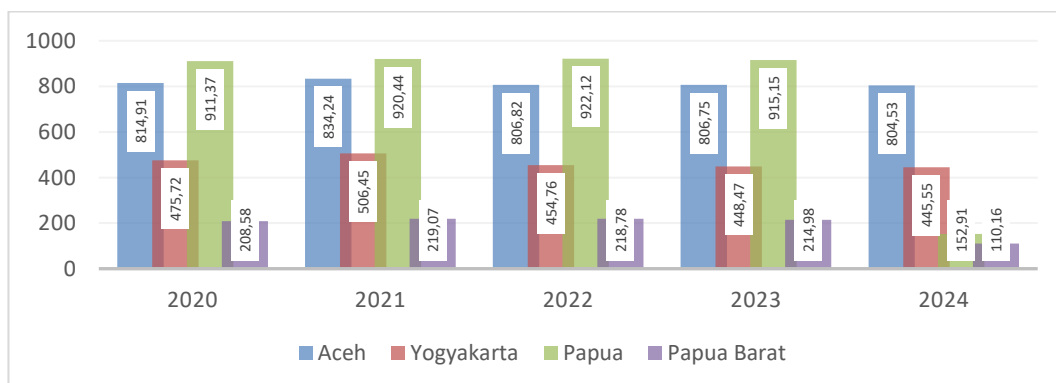
Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidak mampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumber daya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah, berakibat produktivitas juga rendah (Kurniawan, 2018).

Menurut para ahli, kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan memiliki

banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin aset, organisasi sosial politik dan pengetahuan serta keterampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyat, 2016)

Masalah kemiskinan dipicu oleh beberapa hal, diantaranya adalah mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal dan keterampilan. Selain itu, pada umumnya mereka tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah juga menjadi pemicu tingginya angka kemiskinan. Tingkat pendidikan rendah ini terjadi akibat mereka dahulu tidak ada waktu untuk belajar guna membantu orang tua bekerja untuk menambah penghasilan. Karena tingkat pendidikan yang rendah ini, mereka tidak bisa memperoleh pekerjaan yang layak. Banyak diantara mereka menjadi buruh tani karena tidak mempunyai tanah atau pekerja kasar diluar pertanian (Arsyat, 2016).

Pada penelitian ini yang difokuskan membahas mengenai Kemiskinan 4 Provinsi di Indonesia. Berikut dapat dilihat Kemiskinan 4 Provinsi di Indonesia selama 5 tahun diantaranya provinsi Aceh, Yogyakarta, Papua dan Papua Barat :



Gambar 1. 1
Kemiskinan Provinsi Aceh, Yogyakarta, Papua dan Papua Barat
Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwasannya kemiskinan di Provinsi Aceh pada tahun 2020 sebesar 814 ribu jiwa mengalami peningkatan tahun 2021 sebesar 834 ribu jiwa. Meningkatnya kemiskinan di Provinsi Aceh karena tingginya angka pengangguran di beberapa kabupaten/kota Provinsi Aceh (Andiny & Mandasari, 2017). Peningkatan kemiskinan ini juga disebabkan pemulihan ekonomi pasca covid-19. Sedangkan di tahun 2022 dan 2023 angka kemiskinan di Provinsi Aceh berada pada angka 806 ribu jiwa. Dan menurun di tahun 2024 dengan jumlah kemiskinan sebesar 804 ribu jiwa. Kemiskinan di tahun 2024 merupakan angka terendah selama 5 tahun terakhir pada Provinsi Aceh.

Provinsi Yogyakarta memiliki angka kemiskinan sebesar 475,72 ribu jiwa tahun 2020. Mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 506,45 ribu jiwa. Sama halnya dengan provinsi lain, peningkatan kemiskinan tahun 2021 merupakan dampak dari covid-19. Sedangkan pada tahun 2022-2024 kemiskinan di Yogyakarta mengalami penurunan terus-menerus, dimana tahun 2022 sebesar 454,76 ribu jiwa menurun sebesar 448,47 ribu jiwa tahun 2023, dan kembali mengalami penurunan sebesar 445,55 ribu jiwa ditahun 2024. Menurut BPS 2024, angka kemiskinan di

Yogyakarta mengalami penurunan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya inflasi yang terkendali, pertumbuhan sektor swasta yang semakin pesat, dan keberhasilan berbagai program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah Provinsi Yogyakarta.

Provinsi Papua juga merupakan salah satu provinsi termiskin yang ada di Indonesia. Angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 911,37 ribu jiwa. Selanjutnya, pada tahun 2021-2022 kemiskinan Papua terus meningkat. Dimana tahun 2021 sebesar 920,44 ribu jiwa dan pada tahun 2022 sebesar 922,12 ribu jiwa. Menurut Tri Wahyuni & Damayanti (2014), Kemiskinan yang terjadi di Provinsi Papua memiliki keterkaitan erat dengan dinamika pengangguran dan tingkat pendapatan. yang disebabkan oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan geografis. Akses terhadap infrastruktur dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, masih sangat terbatas, terutama di daerah pedalaman. Tahun 2023-2024 kemiskinan di Papua mengalami penurunan dimana tahun 2023 sebesar 915,15 ribu jiwa dan mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 152,91 ribu jiwa.

Provinsi Papua Barat memiliki angka kemiskinan sebesar 208,58 ribu jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 219,07 ribu jiwa. Tahun 2022-2024 kemiskinan di Provinsi Papua Barat terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2022 angkanya sebesar 218,78 ribu jiwa, kemudian menurun di tahun 2023 sebesar 214,98 ribu jiwa dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024 sebesar 110,2 ribu jiwa. Angka ini merupakan angka terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan angka kemiskinan di Papua Barat pada tahun 2024 terjadi berkat program pemerintah yang fokus pada peningkatan akses layanan dasar, konektivitas wilayah, serta koordinasi dan sinergi

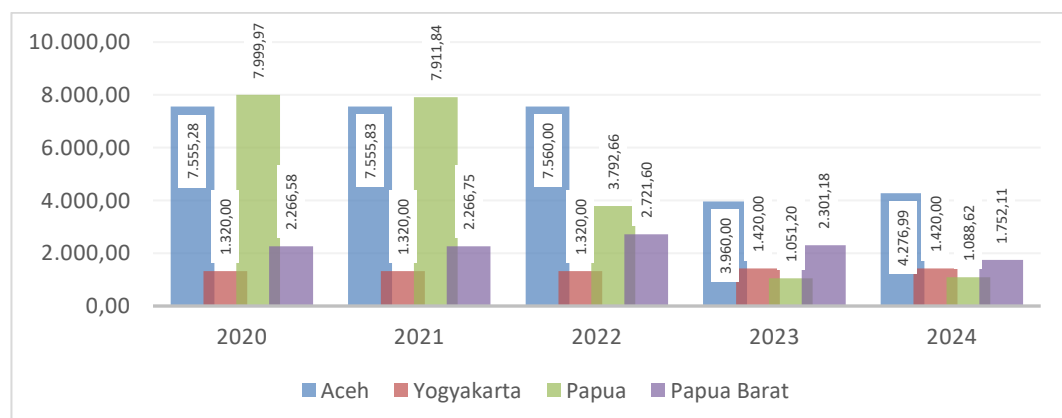
dengan berbagai pihak. Upaya ini sejalan dengan target nasional untuk menghapus kemiskinan ekstrem (BPS, 2024).

Pengentasan kemiskinan dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yaitu dari sisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Dengan adanya kebijakan fiskal ini akan mengatur sedemikian rupa sehingga berpengaruh terhadap kemiskinan suatu Negara (Widyatama *et al.*, 2024). Salah satu pelaksanaannya adalah dana otonomi khusus. Dana OTSUS merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Selain untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, dana otonomi khusus juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah (Widyatama *et al.*, 2024)

Penelitian ini difokuskan untuk membahas permasalahan kemiskinan yang ada di 4 provinsi Indonesia melalui dana otonomi khusus. Dimana menurut UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022 dana otonomi khusus diberikan untuk provinsi Papua, Aceh serta dana keistimewaan Yogyakarta. Dana transfer berupa dana otonomi khusus dipergunakan agar mampu mengejar ketertinggalan dari daerah lain dan membantu daerah tersebut dalam meningkatkan perekonomiannya. Tujuan utama ditujukan dana otonomi khusus adalah mensejahterakan dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Salah satu persoalan karena pengelolaan dana otonomi khusus yang ditujukan kepada daerah yang mendapatkan dana otonomi khusus sangat minim pengawasan (LIPI, 2019).

Menurut teori Muliadi & Amri (2019), Mantsani, dkk (2020) pada dasarnya dana otonomi khusus dapat memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Dimana melalui dana transfer yang diserahkan bagi pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dapat meningkatkan pembangunan misalnya melalui infrastruktur yang berdampak langsung terhadap penduduk miskin. Alasan utama mendapatkan Otonomi Khusus (Otsus) adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal seperti Papua dan Aceh, dengan memberikan kewenangan lebih untuk mengurus daerahnya sendiri, membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi dan perlindungan hak adat, sebagai jawaban atas ketertinggalan historis dan tantangan khusus daerah tersebut.

Penelitian ini akan membahas mengenai dana otonomi khusus 4 Provinsi yang ada di Indonesia yang menerima dana OTSUS, diantaranya Aceh, Yogyakarta, Papua dan Papua Barat. Berikut dapat dilihat data yang disajikan dalam tabel selama 5 tahun terakhir.



Gambar 1. 2 Dana Otonomi Khusus 2020-2024

Sumber :DJPK Kemenkeu, 2025

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dana otonomi khusus Provinsi Aceh Tahun 2020-2021 bernilai konstan yaitu sebesar 7,55 triliun rupiah dan mengalami sedikit peningkatan ditahun 2022 sebesar 7,56 triliun rupiah. Pada tahun 2023 dana otonomi khusus Provinsi Aceh mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 3,96 triliun rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh faktor kebijakan pemerintah pusat yang mengarahkan anggaran ke program prioritas lain atau berkurangnya kebutuhan dana otonomi seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan sosial Aceh (BPK Aceh, 2023). Namun, ditahun 2024 dana otonomi khusus Aceh kembali meningkat sebesar 4,28 triliun rupiah.

Selanjutnya, dana otonomi khusus Provinsi Yogyakarta tahun 2020-2022 bernilai konstan yaitu sebesar 1,32 triliun rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 1,42 triliun rupiah serta tahun 2024 juga bernilai konstan yakni jumlahnya sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan Provinsi Papua memiliki nilai dana otonomi khusus dari tahun 2020-2023 menurun. Pada tahun 2020 dana otonomi khusus Papua sebesar 7,99 triliun rupiah, menurun sebesar 7,91 triliun rupiah ditahun 2021. Kemudian, tahun 2022 dana otonomi khusus Papua mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 3,79 triliun rupiah dan turun kembali sebesar 1,05 triliun rupiah di tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Menurut kajian yang dilakukan DPR, dana otsus masih belum secara efektif menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat dan perbaikan kualitas sumber daya manusia di Papua. Tahun 2020-2021 dana otonomi khusus Papua Barat bernilai konstan dimana DOK Papua Barat pada tahun tersebut sebesar 2,26 triliun rupiah. Kemudian mengalami

peningkatan pada tahun 2022 sebesar 2,72 triliun rupiah. Dan mengalami penurunan pada tahun 2023-2024. Dimana dana otonomi khusus Papua Barat pada tahun 2023 sebesar 2,30 triliun rupiah dan sebesar 1,75 triliun rupiah pada tahun 2024. Penurunan dana otonomi khusus (Otsus) Papua Barat pada tahun 2023-2024 disebabkan oleh penurunan pendapatan daerah, terutama dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang merupakan sumber utama dana Otsus. Keterlambatan dan ketidaklengkapan administrasi daerah juga menjadi faktor penghambat penyaluran dana.

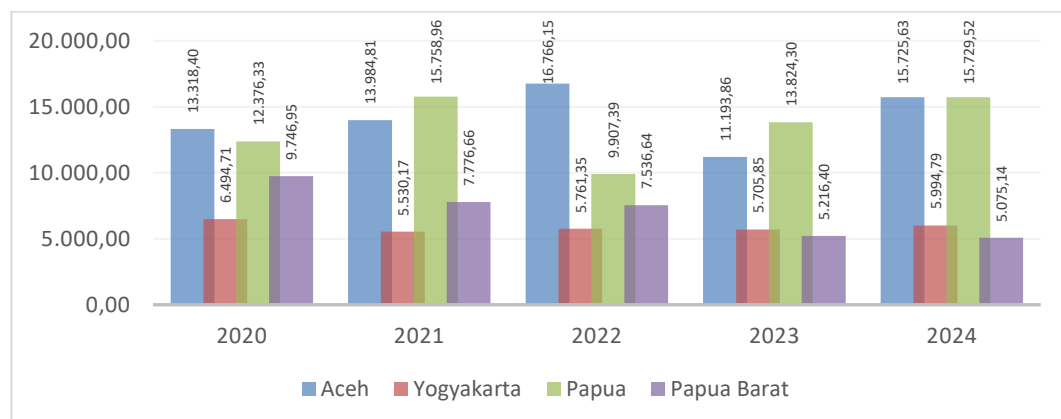
Terjadi Fenomena pada tahun 2023 di Provinsi Papua, dimana Provinsi Papua tahun 2023 mengalami penurunan dana otonomi khusus, namun penurunan ini diikuti dengan penurunan angka kemiskinan yang ada di Papua. Hal ini tidak sejalan penelitian yang dikemukakan oleh teori Muliadi & Amri (2019), Mantsani, dkk (2020). Dimana menurut teori ini dana otonomi khusus berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Kajian terkait dana otonomi khusus terhadap kemiskinan sudah banyak dipublikasi dan diteliti diantaranya penelitian (Kadafi & Murtala, 2020) dengan hasil penelitian dana OTSUS tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. (Nailufar, 2024) dengan hasil penelitian dana OTSUS berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan.

Selain dana otonomi khusus, variabel lain yang dapat mengurangi kemiskinan ialah pengeluaran pemerintah yang secara eksplisit dialokasikan di bidang sekolah dan kesejahteraan, total output nasional provinsi dan upah terendah lokal. Kesejahteraan dan pelatihan yang memadai dapat mempengaruhi penampilan

seseorang, sehingga kelemahan kronis dan kondisi sekolah dapat membuat terjebak dalam pola kemiskinan. Pengeluaran pemerintah adalah salah satu bagian dari pengeluaran keuangan yang bertujuan untuk memperluas laju usaha, membuka pintu bisnis yang berharga, mengikuti kesehatan keuangan dan membuat alokasi gaji yang tidak memihak (R. Amalia & Rahman Razak, 2015).

Menurut teori Anggraini *et al.*, (2022) tujuan dari adanya pengeluaran pemerintah selain untuk pembiayaan agar terus terlaksanakannya kegiatan pemerintahan, tetapi juga untuk peningkatan produktifitas yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan pendapatan atau disebut pemerataan pendapatan, menurunkan kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada penelitian ini akan membahas pengeluaran pemerintah 4 Provinsi di Indonesia, diantaranya Aceh, Yogyakarta, Papua dan Papua Barat. Berikut dapat dilihat data pengeluaran pemerintah selama lima tahun terakhir :



Gambar 1.3
Pengeluaran Pemerintah Aceh, Yogyakarta, Papua dan Papua Barat
Tahun 2020-2025

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwasannya tahun 2021-2023 pengeluaran pemerintah Provinsi Aceh mengalami peningkatan. Dimana pada

tahun 2020 pengeluaran pemerintah Provinsi Aceh sebesar 13.318,40 milyar rupiah dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 13.984,81 milyar rupiah, meningkat kembali di tahun 2022 sebesar 16.766,15 milyar rupiah. Peningkatan pengeluaran pemerintah Provinsi Aceh tahun 2021-2023 dipicu oleh belanja langsung yang terdiri dari belanja barang dan jasa dan belanja modal yang nilainya terus meningkat disetiap tahunnya. Namun, pada tahun 2023 pengeluaran pemerintah Provinsi Aceh menurun sebesar 11.193,86 milyar rupiah. Hal ini dikarenakan menyusutnya dana alokasi umum, turunnya pendapatan transfer dan dana hibah pemerintah pusat (Kadir, 2019). Pengeluaran pemerintah Provinsi Aceh kembali meningkat ditahun 2024 sebesar 15.725, 63 milyar rupiah.

Pengeluaran Pemerintah Provinsi Yogyakarta mengalami fluktuasi disetiap tahunnya, dimana tahun 2020 memiliki pengeluaran pemerintah sebesar 6.494,71 milyar rupiah dan mengalami penurunan ditahun 2021 sebesar 5.530,17 milyar rupiah. Hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang mengurangi aktivitas ekonomi dan mengakibatkan pemerintah Provinsi Yogyakarta harus menyesuaikan anggaran untuk mengelola dan mengalokasikan anggaran secara efektif. Tahun 2022 pengeluaran pemerintah Provinsi Yogyakarta kembali meningkat sebesar 5.761,35 milyar rupiah, namun kembali menurun sebesar 5.705,85 milyar rupiah ditahun 2023. Dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 5.994,79 milyar rupiah.

Provinsi Papua memiliki pengeluaran pemerintah tahun 2020 sebesar 12.376,33 milyar rupiah dan meningkat sebesar 12.758,96 milyar rupiah pada tahun 2021. Namun, tahun 2022 pengeluaran pemerintah Provinsi Papua menurun sebesar

9.907,39 milyar rupiah. Dan terus meningkat pada tahun 2023-2024. Dimana tahun 2023 sebesar 13.824,30 milyar rupiah dan mengalami peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2024 sebesar 15.729,52 milyar rupiah. Hal ini dikarenakan pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk mengatasi kebutuhan krusial masyarakatnya, dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kondisi ekonomi Papua yang berfluktuasi dan tuntutan pelayanan publik yang esensial (BPS Papua, 2024).

Provinsi Papua Barat pada tahun 2020 memiliki pengeluaran pemerintah sebesar 9.746,95 milyar rupiah. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 7.776,66 milyar rupiah. Dan terus mengalami penurunan dari tahun 2022-2024. Tahun 2022 pengeluaran pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 7.536,64 milyar rupiah, menurun kembali pada tahun 2023 sebesar 5.216,40 milyar rupiah dan terus menurun hingga tahun 2024 sebesar 5.075,14 milyar rupiah. Penurunan bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah pusat, perubahan kebutuhan belanja daerah, atau penyesuaian anggaran pasca pemekaran daerah.

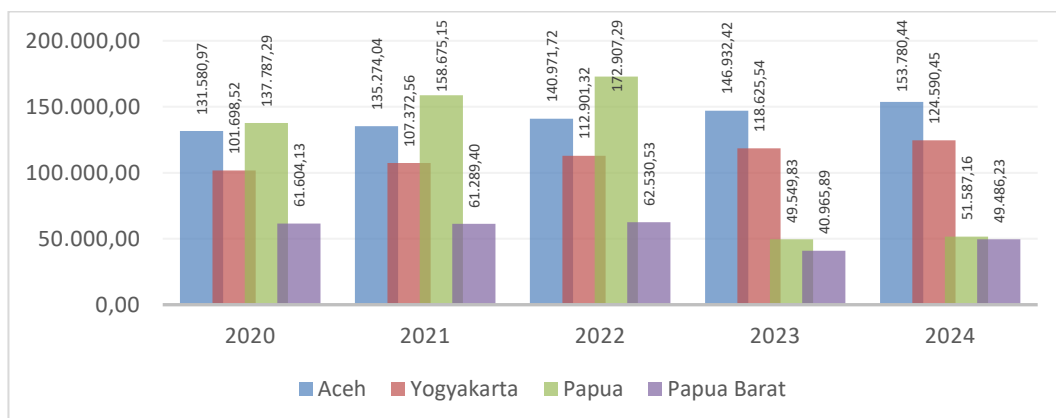
Terjadi fenomena pada variabel pengeluaran pemerintah di Provinsi aceh tahun 2021, Provinsi Yogyakarta tahun 2021 serta Provinsi Papua tahun 2021 dimana pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan, namun diikuti dengan peningkatan angka kemiskinan ditahun tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Anggraini *et al.*, (2022), dimana pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Kajian terkait pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan sudah banyak diteliti (Rai *et al.*, 2019) fokus pada pengeluaran pemerintah di Kabupaten/Kota

Provinsi Bali, dengan hasil penelitian pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh langsung negatif terhadap kemiskinan. (Goni *et al.*, 2022) meneliti pengeluaran pemerintah di Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan hasil penelitian secara parsial variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, (Sunusi *et al.*, 2014) memberi perhatian pada pengeluaran pemerintah Sulawesi Utara, dengan hasil penelitian pengeluaran pemerintah berpengaruh langsung negatif terhadap kemiskinan.

Selain, variabel dana otonomi khusus dan pengeluaran pemerintah. Penelitian ini juga menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang mempengaruhi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai tindakan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produktif untuk menghasilkan output yang diukur dengan menggunakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang merupakan indikator keberhasilan ekonomi suatu negara (Adisasmita, 2013).

Menurut Didu & Fauzi, (2016) bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Berikut dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh, Yogyakarta, Papua dan Papua Barat selama 5 tahun terakhir :



Gambar 1. 4

PDRB Provinsi Aceh, Yogyakarta, Papua dan Papua Barat Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel 1.4 di atas dapat dilihat bahwa PDRB provinsi Aceh tahun 2020 sebesar 131,58 milyar rupiah, kemudian mengalami peningkatan ditahun 2021-2024. Yakni tahun 2021 meningkat sebesar 135,27 milyar rupiah, tahun 2022 sebesar 140,97 milyar rupiah, tahun 2023 sebesar 146,93 milyar rupiah dan tahun 2024 meningkat sebesar 153,78 milyar rupiah. Membaihnya PDRB di Provinsi Aceh dipengaruhi oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024 (Bank Indonesia, 2024).

Sedangkan pada provinsi Yogyakarta PDRB tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 PDRB Yogyakarta sebesar 101,70 milyar rupiah, meningkat di tahun 2021 sebesar 107,37 milyar rupiah, tahun 2022 PDRB Yogyakarta sebesar 112,90 milyar rupiah meningkatkan pada tahun 2023 sebesar 118.62 milyar rupiah, Kembali meningkat di tahun 2024 sebesar 124,59 milyar rupiah. PDRB Yogyakarta terus meningkat karena adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, terutama di dorong oleh sektor pariwisata dan pendidikan tinggi, serta kolaborasi antara berbagai unsur di daerah tersebut. Selain

itu, peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi DIY (Qumayroh *et al.*, 2023).

PDRB provinsi Papua terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022, dimana tahun 2020 PDRB Papua sebesar 137,79 milyar rupiah, meningkat sebesar 158,67 milyar rupiah pada tahun 2021, tahun 2022 meningkat sebesar 172,91 milyar rupiah. PDRB Papua mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022, terutama dipicu oleh sektor pertambangan dan penggalian. Sektor ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Papua, bahkan saat pandemi Covid-19, ketika sektor lain mengalami kontraksi. Selain itu, ada juga kontribusi dari *event* besar seperti PON Papua yang juga turut meningkatkan PDRB di luar sektor tambang. Namun, pada tahun 2023 PDRB Papua mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 49,55 milyar rupiah. Hal ini disebabkan oleh menurunnya produksi emas dan tembaga akibat curah hujan dan tanah longsor, karena sebagian besar PDRB Papua didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, akibatnya produksi menurun dan pertumbuhan PDRB juga ikut turun (BPS Papua, 2023). Namun, tahun 2024 kembali meningkat sebesar 51,59 milyar rupiah. hal ini dikarenakan peningkatan produksi migas (minyak dan gas), terutama didorong oleh beroperasinya proyek LNG Tangguh Train 3. Peningkatan kapasitas produksi LNG ini signifikan meningkatkan output dari sektor industri pengolahan dan pertambangan, serta mendorong kinerja ekspor luar negeri (BPS Papua Barat, 2024).

PDRB Provinsi Papua Barat tahun 2020 sebesar 61,60 milyar rupiah. Menurun di tahun 2021 sebesar 61,29 milyar rupiah. Tahun 2022 PDRB Provinsi

Papua Barat mengalami peningkatan sebesar 62,53 milyar rupiah. Dan terus mengalami penurunan dari tahun 2023-2024 sebesar 40,96 milyar rupiah tahun 2023, sebesar 49,49 milyar rupiah tahun 2024.

Terjadi fenomena pada variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi aceh tahun 2021, Provinsi Yogyakarta tahun 2021 serta Provinsi Papua tahun 2021 dimana pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB mengalami peningkatan, namun diikuti dengan peningkatan angka kemiskinan ditahun tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Didu & Fauzi, (2016), dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, yang apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan menurunkan kemiskinan.

Kajian terkait pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan seperti penelitian (Safuridar, 2017) fokus pada pertumbuhan ekonomi di kabupaten Aceh Timur dengan hasil penelitian pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Aceh Timur, (Ishak *et al.*, 2020) meneliti terkait pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar dengan hasil penelitian pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan. (Krida *et al.*, 2021) meneliti pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dengan hasil penelitian pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara, (Pananrangi, 2012) fokus pada variabel bebas pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan dengan hasil penelitian pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Selatan.

Adapun keterbaruan dalam penelitian ini ialah pada wilayah otonomi khusus yang digunakan, dimana penelitian sebelumnya meneliti otonomi khusus pada satu

Provinsi saja seperti penelitian Kadafi & Murtala, (2020), Machfud *et al.*, (2021), dan Khairil Amar *et al.*, (2023), sedangkan penelitian ini membahas mengenai otonomi khusus pada 4 Provinsi di Indonesia yakni Aceh, Papua dan Papua Barat serta Yogyakarta sebagai penerima Dana Keistimewaan Daerah Yogyakarta.

Pemilihan Provinsi Aceh, Papua, Papua Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penelitian ini didasarkan pada perbedaan karakteristik kebijakan fiskal dan kondisi kemiskinan antarwilayah. Aceh, Papua, dan Papua Barat merupakan provinsi penerima Dana Otonomi Khusus yang bertujuan mempercepat pembangunan dan menurunkan kemiskinan, namun hingga kini masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih sebagai daerah pembanding karena tidak menerima Dana Otonomi Khusus, tetapi memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi meskipun pertumbuhan ekonomi dan indikator pembangunan manusianya relatif baik. Perbedaan kondisi tersebut menjadikan keempat provinsi ini relevan untuk dianalisis guna menilai pengaruh Dana Otonomi Khusus, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut akan dilakukan penelitian permasalahan tentang kemiskinan dengan judul **“Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan 4 Provinsi di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan oleh penulis di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh dana otonomi khusus terhadap Kemiskinan 4 Provinsi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Kemiskinan 4 Provinsi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Kemiskinan 4 Provinsi di Indonesia?
4. Bagaimana Pengaruh dana otonomi khusus, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap Kemiskinan 4 Provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk :

1. Mengetahui pengaruh dana otononomi khusus terhadap Kemiskinan 4 Provinsi di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Kemiskinan 4 Provinsi di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Kemiskinan 4 Provinsi di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh dana otonomi khusus, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap Kemiskinan 4 Provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ilmiah tentunya dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan
- b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan akademik dan bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini akan memberikan gambaran dan menambah pengetahuan dan wawasan untuk memahami persepsi dana otonomi khusus, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi terhadap Kemiskinan 4 Provinsi di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini akan menjadi literatur ilmiah yang berguna untuk kegiatan akademik bagi penelitian mereka sendiri dan untuk fakultas.
- c. Dibandingkan dengan yang diharapkan, penelitian ini akan menambah wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas tentang pengaruh dana otonomi khusus, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap Kemiskinan 4 Provinsi di Indonesia.
- d. Sebagai tambahan referensi bagi instansi pemerintahan yang terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)